

## DETERMINAN KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

<sup>1</sup>Addinul Ikhsan, <sup>2</sup>Harsi Romli, <sup>3</sup>Fakhry Zamzam

<sup>1</sup> Program Magister Universitas IGM Palembang. Email: adinulikhsan20@gmail.com

<sup>2</sup> Program Magister Universitas IGM Palembang. Email: harsi\_romli@uigm.ac.id

<sup>3</sup> Program Magister Universitas IGM Palembang. Email: fakhry@uigm.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to determine what factors influence the spending policy of the Ogan Ilir district government. The independent factors in this study are Regional Taxes (X1), Regional Retribution Variables (X2), Separated Regional Assets Result Variables (X3) and Other Variables Legal Original Regional Income (X4), while the dependent factor is Regional Expenditure (Y). The analysis was carried out with multiple linear regressions. The results of this study were Regional Taxes (X1), Regional Retribution (X2) Separated Regional Assets (X3) Other Legitimate Original Regional Income (X4) simultaneously affected district government spending. Ogan Ilir. Local Taxes (X1), Retribution (X2) Separated Regional Wealth (X3) Other Legitimate Original Revenue (X4) has a partial effect on the local government of Ogan Ilir Regency.*

**Keywords:** *Local Taxes, Regional Retributions, Separated Regional Assets, Other Legitimate Regional Original Revenues, Regional Expenditures*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan belanja pemerintah daerah kabupaten Ogan Ilir. Faktor independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (X1), Variabel Retribusi Daerah (X2), Variabel Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan (X3) serta Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X4), sedangkan faktor dependennya adalah Belanja Daerah (Y). Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) Kekayaan Daerah yang dipisahkan (X3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir. Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) Kekayaan Daerah yang dipisahkan (X3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X4) berpengaruh secara parsial terhadap pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir.

**Kata kunci:** *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Belanja Daerah*

### Pendahuluan

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam menggali PAD melalui pajak dan retribusi daerah dirasa masih belum optimal karena adanya beberapa faktor penyebab diantaranya kurangnya kemampuan dari sektor usaha dalam memberikan sumbangan terhadap kemampuan keuangan daerah, hal ini juga diperparah dengan adanya kenyataan bahwa Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam menggali PAD yang disebabkan sumber-sumber penerimaan

daerah telah dicatat oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan batasan peraturan perundang-undangan

Kontribusi PAD terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir selama yaitu periode 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Kontribusi PAD terhadap APBD**  
**Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir**  
**TA 2014 s.d 2017**

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	APBD (Rp)	Kontribusi (%)

2014	32.767.859. 306,00	1.136.280.535.363, 00	3%
2015	42.551.446. 331,00	1.021.955.180.536, 00	4%
2016	112.809.05 3.302,07	1.246.237.125.047, 52	9%
2017	42.104.082. 238,46	1.295.397.233.484, 17	3%
2018			

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Ilir'2020

Pada tabel di atas, terlihat bahwa PAD Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada cenderung meningkat, namun persentase kontribusi PAD relatif kecil sehingga tidak memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap APBD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ogan Ilir masih sangat tergantung pada besarnya bantuan dari Pemerintah Pusat.

**Tabel. 1.2**

**Jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2014 – 2017**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan	Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Belanja Daerah
2014	71.865.202.344	4.912.441.732	4.912.441.732	71.865.202.344	964.153.853.642,00
2015	13.374.451.125	4.868.464.069	21.279.547.099	13.374.451.125	1.281.094.029.406,34
2016	62.843.668.168	4.385.865.468	42.406.558.992	62.843.668.168	1.246.237.125.047,52
2017	15.769.597.192	4.937.129.264	18.399.859.018	15.769.597.192	1.291.558.646.734,81
2018					
	163.852.918,829	19.103.900,533	86.998.406,841	10.270.543.415	4.783.043.654.830,67

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Ilir'2020

Dari tabel 1.2 di atas terlihat jumlah dari Pajak Daerah yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam kurun Waktu 2014 – 2017 adalah sebesar 163,85 Milyar Rupiah yang didapat dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkantoran serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam Kurun Waktu 2014-2017 sebesar 19,1 Milyar Rupiah yang didapat dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Tanah dan Bangunan), Retribusi Sewa tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan mayat, Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya cetak penyediaan peta dasar (Garis), Retribusi pemberian izin mendirikan bangunan, retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, Retribusi PKB-Mobil Bus Umum dan Mobil Tak Umum, Retribusi PKB-Mobil Penumpang Umum, Retribusi PKB-Mobil Barang umum dan tak umum, Retribusi PKB-Mobil Khusus, Retribusi PKB-Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan, Retribusi Terminal-Tempat Parkir untuk kendaraan Penumpang dan Bis Umum, Retribusi Terminal-Tempat Kegiatan Usaha, Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di lingkungan terminal, Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan, Retribusi Pelayanan Penyeberang orang/barang, Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi/Badan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium, Retribusi Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan sementara, Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, Retribusi pemberian izin gangguan ringan, Retribusi pemberian izin gangguan berat, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan, Retribusi Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Pelayanan

Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam kurun waktu 2014-2017 adalah sebesar 10,27 Milyar. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam kurun waktu tahun 2014 s/d 2017 sebesar 86,99 Milyar Rupiah, yang didapat melalui Jasa Giro Kas Daerah, Bunga Deposito pada Bank Sumsel Babel, Pendapatan dari Pengembalian PPh Pasal 21, Hasil Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya.

Menurut UU No.32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 Pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah. Menurut Halim (2007) menyatakan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Simanjuntak (2003) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing.

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan unsur-unsur dari Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air

Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Izin Praktek Kesehatan, Retribusi Jasa Laboratorium, Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, Retribusi Izin Penimbunan Rawa, Retribusi Izin Galian, Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat, Retribusi Pemeriksaan Alat Pamadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah, Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Reklame, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Kegiatan yang wajib dilengkapi kajian lingkungan, Retribusi Pelayanan Persampahan atau kebersihan, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus, Retribusi Izin Gangguan/keramaian, Retribusi Pembinaan Usaha Kepariwisataaan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Usaha Kehutanan, Retribusi Sarang Burung Walet, Retribusi Izin Usaha Industri, Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.

Unsur-Unsur Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan menurut UU NO.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah Bagian atas Laba Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat. Unsur-Unsur Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atau tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dirinci menjadi beberapa kategori yang meliputi: Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Hal ini didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Dian Nofriana Batubara (2009) dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pada Pemerintah Kabupaten dan

Kota di Propinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa secara Simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pemerintah Serta Penelitian yang dilakukan oleh Cherry Adhia Wenny (2012) dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pada Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan

Dari fenomena tersebut dalam konteks otonomi daerah, seharusnya kemampuan untuk menyelenggarakan otonomi tersebut ditunjukkan dengan peranan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan di dalam membiayai Belanja Daerahnya yang tercermin pada Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Pada dasarnya selain faktor Pendapatan Asli Daerah dengan Komponennya yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan yang mempengaruhi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, masih ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhinya yaitu komponen Dana Perimbangan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Akan tetapi karena keterbatasan Kemampuan, biaya dan waktu sehingga variabel ini tidak dibahas di dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan tentang permasalahan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam kurun waktu dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dengan judul “Determinan Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir

### Rumusan Masalah

Sesuai pembatasan masalah yang telah ditentukan diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Bagaimanakah Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir?.
- (2) Bagaimanakah Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Bagaimanakah Pengaruh Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir?.
- (4) Bagaimanakah Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir?.
- (5) Bagaimanakah Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir?.
- (6) Bagaimanakah Pengaruh secara Simultan Variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir?

### Kajian Pustaka

#### 1. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan telah banyak di definisikan oleh para ahli diantaranya Gitman (2012) mengemukakan bahwa “*Finance can be defined as the science and art of managing money*” artinya “Keuangan dapat di definisikan sebagai seni dan ilmu mengelola uang”. Dari definisi tersebut maka dapat di

kembangkan bahwa keuangan sebagai seni berarti melibatkan keahlian dan pengalaman, sedangkan sebagai ilmu berarti melibatkan prinsip-prinsip, konsep, teori, proporsi dan model yang ada dalam ilmu keuangan. Lain halnya pengertian manajemen keuangan menurut Horne & Wachowicz Jr (2012) Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum”.

#### 2. Pendapatan Asli Daerah

UU No.33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah seluruh Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

#### 3. Pajak Daerah

Halim (2007) menyebutkan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak. Lebih lanjut Simanjuntak (2003:32) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing.

#### 4. Retribusi Daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan jika Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### **5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Sesuai ketentuan UU No.33 Tahun 2004, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian atas laba penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, Bagian laba atas Penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Penelitian ini adalah Penerimaan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

### **6. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai UU No.33 Tahun 2004, menyebutkan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atau tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan

keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Penelitian ini adalah Penerimaan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Pemerintah yang dipisahkan.

### **7. Belanja Daerah**

Pengertian belanja menurut PP No.24 Tahun 2005, yaitu “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah”. Sedangkan menurut Priyo (2009) menyatakan belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah.

## **Metodologi Penelitian**

### **1. Populasi**

Populasi menurut Sugiyono (2013) adalah wilayah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diharapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir khususnya mengenai Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan menggunakan data runtun waktu (time series).

### **2. Sampel**

Sugiyono (2013) menyatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah selama tahun 2014 – 2018 terdiri dari 5 tahun.

### 3. Variabel dan Operasional Variabel

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang akan diuji maka variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah variabel bebas (Independent) yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X3) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (X4) serta variabel terikat (Dependent) yaitu Belanja Daerah.

### Teknik Analisis Data

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu pengujian untuk membuktikan bahwa data yang didapat normal yaitu data nilai tinggi, rendah dan seimbang. Pengujian normalitas masing-masing variabel dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah sebaran data dari setiap variabel tidak menyimpang dari ciri-ciri data yang berdistribusi normal.' Pengujian normalitas data populasi dilakukan dengan menggunakan Komogrov-Semirnov Test, alat uji ini biasa disebut dengan uji K-S dari Program SPSS. Interpretasi normalitas data dihitung dengan cara membandingkan nilai Asymptotic Significance yang diperoleh dengan nilai  $\alpha = 0,05$ . Jika  $Asymp.Sig > 0,05$ , maka data dapat dikatakan berdistribusi Normal.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan situasi dimana terjadi korelasi berganda yang sangat tinggi, jika salah satu dari variabel bebas beregresi terhadap variabel bebas yang lain. Seperti dikatakan Rievelt (2003:16) multikolinearitas memiliki arti adanya korelasi diantara dua atau lebih variabel bebas.

Berarti jika antara variabel yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi satu dengan yang lain atau berkorelasi tetapi tidak lebih tinggi dari  $r$ , maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji asumsi ini dilakukan dengan cara menghitung nilai Variance Inflating Factor (VIF). Apabila VIF lebih kecil dari 5 maka berarti tidak terjadi multikolinearitas (Santoso, 2009). Sementara itu dalam referensi lain disebutkan nilai kritik untuk nilai VIF adalah 10.

#### 3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji  $= 5\%$ . Apabila  $D - Wa$  Durbin-Watson (D-W) dengan tingkat kepercayaan terletak antara  $-2$  samapi  $=2$  maka tidak ada autokorelasi (Santoso,2009).

#### 4. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual pengamatan satu ke pengamatan lain. Jika varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 5. Analisis Statistik Inferensial

Adalah analisis yang bertujuan untuk membuat atau menarik keputusan, kesimpulan pada sampel, yang meliputi:

a. Analisis Regresi Berganda

Menurut Pabandu Tika (2006:89) untuk mengetahui seberapa besar nilai Y, penulis menggunakan rumus regresi berganda yaitu:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4 + e$$

Dimana:

Y = Belanja Daerah (Rp)

a = Konstanta

X1 = Pajak Daerah (Rp)

X2 = Retribusi Daerah (Rp)

X3 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Rp)

X4 = Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp)

b<sub>1</sub>b<sub>2</sub>b<sub>3</sub> b<sub>4</sub> = Koefisien Estimasi

b. Analisis Korelasi dan Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengukur berapa bagian dari total keragaman dalam variabel Dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh beragamnya nilai-nilai yang diberikan Variabel Independen (X) Koefisien determinasi dengan simbol r<sup>2</sup> merupakan proporsi Variabilitas dalam suatu data yang dihitung dalam suatu didasarkan pada model statistik. Menurut Ridwan (2006) apabila nilai r = -1, artinya korelasi negatif sempurna; r = 0 artinya tidak ada korelasi; dan r = +1 berarti korelasinya sangat kuat. Artinya harga r akan diterjemahkan dengan tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1.**

**Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,00	Sangat Kuat
0,60 – 0,79	Kuat
0,40 – 0,59	Cukup Kuat
0,20 – 0,39	Rendah
0,00 – 0,19	Sangat Rendah

**6. Pengujian Hipotesis Statistik**

Menurut F.N Kerlinger yang dikutip dari buku karangan Tika (2006:29) menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat terkaan dari

hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan pernyataan diatas serta karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam membuat hipotesis, sehingga peneliti dalam penelitian ini merumuskan hipotesis yang akan diuji secara statistik dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Kriteria Penerimaan Hipotesis**

No	Hipotesis	Pernyataan	Kriteria
1	Ho.1	Tidak terdapat Pengaruh Variabel Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	Jika t tabel < t hitung, sig >0,05
	Ha.1	Terdapat Pengaruh Variabel Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	Jika t tabel > t hitung , Sig < 0,05
2	Ho.2	Tidak terdapat Pengaruh Variabel Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	Jika t tabel < t hitung, sig >0,05
	Ha.2	Terdapat Pengaruh Variabel Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	Jika t tabel > t hitung , Sig < 0,05
3	Ho.3	Tidak terdapat	Jika t

		Pengaruh Variabel Kekayaan Daerah yang dipisahkn terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	tabel < t hitung, sig >0,05
	Ha.3	Terdapat Pengaruh Variabel Kekayaan Daerah yang dipisahkn terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	Jika t tabel > t hitung , Sig < 0,05
4	Ho.4	Tidak erdapat Pengaruh Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	Jika t tabel < t hitung, sig >0,05
	Ha.4	Terdapat Pengaruh Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	Jika t tabel > t hitung , Sig < 0,05
5	Ho.5	Tidak Terdapat pengaruh Variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan	Jika F tabel < F hitung, sig >0,05

		Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	
	Ha.5	Terdapat pengaruh Variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	Jika F tabel > F hitung , Sig < 0,05

Sumber : Diolah Peneliti'2020

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 41.**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000310
	Std. Deviation	6420032958,29919000
Most Extreme Differences	Absolute	,117
	Positive	,079
	Negative	-,117
Kolmogorov-Smirnov Z		,906
Asymp. Sig. (2-tailed)		,385

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Dari hasil uji normalitas didapatkan nilai *Asymptotic Significance* ketiga

Variabel Bebas (Variabel X) menunjukkan angka yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  yaitu sebesar 0,385, sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta Belanja Daerah terdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas ini dilakukan dengan cara menghitung nilai *Variance Inflating Factor* (VIF). Apabila VIF lebih kecil dari 5 maka berarti tidak terjadi Multikolinearitas. Sementara itu dalam referensi lain disebutkan nilai kritik untuk nilai VIF adalah 10. Hasil pengujian Multikolinearitas dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	Pajak Daerah	,413	2,418
	Retribusi Daerah	,654	1,530
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	,771	1,297
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	,516	1,938

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Dari pengujian diatas, terlihat bahwa nilai *Variance Inflating Factor* (VIF) masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 5 (Lima), yaitu untuk Variabel Pajak Daerah (X1) sebesar 2,418, Variabel Retribusi Daerah (X2) sebesar 1,530, Variabel Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (X3) sebesar 1,297 dan Variabel Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X4) sebesar 1,938 Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinearitas.

**c. Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson dengan

tingkat kepercayaan terletak antara -2 sampai +2, maka tidak ada autokorelasi. Dibawah ini disajikan hasil pengujian Autokorelasi:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,985 <sup>a</sup>	,970	,968	664939172 6,04703	,842

a. Predictors: (Constant), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

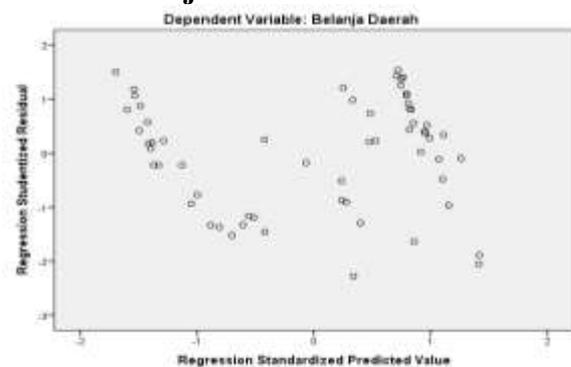
Sumber: Pengolahan Data SPSS

Dari pengujian diatas, diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 0,842. Nilai tersebut dapat dikatakan mendekati dua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Autokorelasi.

**d. Uji Heterokedastisitas**

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan. Pendekatan yang dilakukan menurut Santoso (2009:210) adalah dengan menggunakan *Scatterplot Regresion*, dimana apabila persebaran titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi Heterokedastisitas. Hasil pengujian Heterokedastisitas terlihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 4.1.**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber: Pengolahan Data SPSS

Dari gambar diatas terlihat bahwa titik bersebaran di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, serta tidak membentuk bentuk tertentu, sehingga

dapat disimpulkan tidak terjadinya Heterokedastisitas.

**2. Hasil Pengujian Statistika Inferensial**

**a. Analisis Korelasi dan Determinasi**

**1). Analisis Korelasi**

Analisis ini digunakan untuk mengukur berapa bagian dari total keragaman dalam variabel terikat (Y) yang dapat dijelaskan oleh beragamnya nilai-nilai yang diberikan oleh variabel bebas (X), yang dijelaskan secara bersama-sama: Yang meliputi Variabel Pajak Daerah (X<sub>1</sub>), Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (X<sub>3</sub>) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X<sub>4</sub>) dengan Variabel Belanja Daerah (Y).

Besarnya nilai Koefisien Determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4.**

**Koefisien Korelasi dan Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,985 <sup>a</sup>	,970	,968	6649391726,04703

Dari tabel diatas, terlihat Koefisien Korelasi (R) sebesar 0,985 yang berarti hubungan antara Variabel Pajak Daerah (X<sub>1</sub>), Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (X<sub>3</sub>) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X<sub>4</sub>) dengan Variabel Belanja Daerah (Y) adalah sangat Kuat

**2). Analisis Determinasi**

Dari tabel diatas, dapat diketahui Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) didapat dari Koefisien Regresi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,968 yang berarti 96,8% proporsi variasi variabel Pajak Daerah (X<sub>1</sub>), Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (X<sub>3</sub>) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X<sub>4</sub>) terhadap variasi Variabel Belanja Daerah (Y). Sisanya (100% - 96,8% = 3,2%) dipengaruhi oleh variabel diluar dari variabel Pajak Daerah (X<sub>1</sub>), Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (X<sub>3</sub>) dan Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah (X<sub>4</sub>) yaitu Dana Perimbangan dari Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

**b. Pengujian Hipotesis Statistik**

Pada penelitian telah diajukan terlebih dahulu hipotesis dan akan diuji secara statistik dalam penelitian ini, yaitu:

**Tabel 45.**  
**Tabel Anova**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	7977350533623 6480000000,000	4	1994337 6334059 1200000 00,000	451,0 61	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2431792567953 2480000000,000	55	4421441 0326422 690000, 000		
	Total	8220529790418 9730000000,000	59			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Pajak Daerah (X<sub>1</sub>), Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>) Kekayaan Daerah yang dipisahkan (X<sub>3</sub>) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X<sub>4</sub>) secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten Ogn Ilir karenanilai sig < 0,05.

**c. Analisis Regresi Berganda**

Analisis ini berguna untuk mengetahui besarnya pengaruh yang terjadi pada variabel Pajak Daerah (X<sub>1</sub>), Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (X<sub>3</sub>) serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X<sub>4</sub>) dan Kinerja Pegawai (Y), yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6.**

**Tabel Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	75723 12252 9,308	643859699 2,813		11,76 1	,000

Pajak Daerah	3,126	,160	,705	19,54	,000
Retribusi Daerah	,696	,255	,078	2,727	,009
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5,807	1,239	,124	4,687	,000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,781	,248	,362	11,21	,000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah  
Sumber: Pengolahan Data SPSS

Dari tabel diatas, terlihat bahwa koefisien regresi untuk Variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ) adalah sebesar 3,126, Variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ) sebesar 0,696, Variabel Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan ( $X_3$ ) sebesar 5,807 dan Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ( $X_4$ ) sebesar 2,781 serta juga menghasilkan konstanta sebesar 723.122.529,308. Sehingga persamaan regresi berganda penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 723.122.529,308 + 3,126X_1 + 0,696X_2 + 5,807X_3 + 2,781X_4 + e$$

Hasil perhitungan pada tabel 4.6.diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 723.122.529,308 menyatakan bahwa jika tidak Variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ), Variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ), Variabel Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan ( $X_3$ ) serta Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ( $X_4$ ), maka Belanja Daerah ( $Y$ ) akan sebesar Rp 723.122.529,308
2. Dengan melihat besarnya koefisien regresi Variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ) 3,126. Artinya kecenderungan proyeksi perubahan antara Variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ) dengan Variabel Belanja Daerah ( $Y$ ) menunjukkan bahwa setiap perubahan atau peningkatan Variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ) sebesar (karena tanda +) Rp 1 maka akan meningkatkan perubahan

atau peningkatan pula pada Variabel Belanja Daerah sebesar Rp 3,126

3. Dengan melihat besarnya koefisien regresi Variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ) 0,696. Artinya kecenderungan proyeksi perubahan antara Variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ) dengan Variabel Belanja Daerah ( $Y$ ) menunjukkan bahwa setiap perubahan atau peningkatan Variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ) sebesar (karena tanda +) Rp 1, maka akan meningkatkan perubahan atau peningkatan pula pada Variabel Belanja Daerah sebesar Rp 0,696
4. Dengan melihat besarnya koefisien regresi Variabel Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan ( $X_3$ ) 5,807. Artinya kecenderungan proyeksi perubahan antara Variabel Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan ( $X_3$ ) dengan Variabel Belanja Daerah ( $Y$ ) menunjukkan bahwa setiap perubahan atau peningkatan Variabel Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan ( $X_3$ ) sebesar (karena tanda +) Rp 1, maka akan meningkatkan perubahan atau peningkatan pula pada Variabel Belanja Daerah sebesar Rp 5,807
5. Dengan melihat besarnya koefisien regresi Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ( $X_4$ ) 2,781. Artinya kecenderungan proyeksi perubahan antara Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ( $X_4$ ) dengan Variabel Belanja Daerah ( $Y$ ) menunjukkan bahwa setiap perubahan atau peningkatan Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ( $X_4$ ) sebesar (karena tanda +) Rp 1, maka akan meningkatkan perubahan atau peningkatan pula pada Variabel Belanja Daerah sebesar Rp 2,781.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir.
2. Retribusi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) Kekayaan Daerah yang dipisahkan (X3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan persamaan regresi berganda dalam penelitian ini menjadi sebagai berikut:  $\hat{Y} = 723.122.529,308 + 3,126X1 + 0,696X2 + 5,807X3 + 2,781X4 + e$

### Daftar Pustaka

- Ang Sandera Widjaja Koesoema, 2011, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri, *Jurnal Cahaya Aktiva* Vol.01 No.01, September 2011, p 10-18
- Arlini, Hilda, 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kota Palembang. Palembang, *Jurnal Ilmiah Universitas Bina Darma*

- Gitman, L.J.; Zutter, C.J. 2012. *Principles of Managerial Finance*. 13e. Boston: Pearson.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Erlang
- Horne, James C. Van dan John M Wachowicz Jr. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan* (Edisi 13). Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Santoso, S. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta, Alfabeta
- Sugiyono.2006.*Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.

Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009  
tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah. Jakarta

Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004  
tentang Otonomi Daerah. Jakarta

Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004  
tentang Perimbangan Keuangan  
antara Pemerintah Pusat dan  
Daerah. Jakarta

Zamzam, F. 2018. *Aplikasi Metodologi  
Penelitian*. Yogyakarta: CV. Budi  
Utama.